



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Agustus 2022
Waktu : Pukul 16.00 s.d. 18.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : 1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021;
2. Realisasi APBN TA 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2022;
3. Membahas RKA K/L TA 2023 Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2023;
4. Membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
43 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 11 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Mochamad Herviano
4. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
5. Sukur H. Nababan, S.T.
6. Ir. Sudjadi
7. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
8. H. Irmadi Lubis
9. Ir. Effendi Sianipar
10. Harvey B. Malaihollo

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 5. Ilham Pangestu
 6. Muhammad Fauzi, S.E.
 7. Ir. H. Anang Susanto, M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Sudewo, S.T., M.T.
 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 4. Drs. H. Mulyadi, M.MA.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.
 4. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 5. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. Sofyan Ali, S.H.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. drh. Jhonni Allen Marbun, M.M.
 3. Lasmi Indaryani, S.E.
 4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 2. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. H.A. Bakri H. M., S.E.
2. Athari Ghauthi Ardi
3. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
4. H. Boyman Harun, S.H.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Perhubungan RI (Ir. Budi Karya Sumadi)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri Perhubungan beserta jajarannya, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali Rapat Kerja hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat, baik secara fisik maupun secara virtual dari tempat masing-masing.

Menurut laporan dari Sekretariat daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 31 orang, terdiri fisik 13 orang dan virtual 18 orang, jumlah Fraksi adalah 9 Fraksi sehingga dinyatakan memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.00 WIB)

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini untuk hadir secara fisik.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri yang kami hormati,**

Berdasarkan surat Badan Anggaran mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023, maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan Raker dengan mitra kerjanya dengan agenda:

1. Membahas laporan keuangan pemerintah pusat APBN Tahun Anggaran 2021;
2. Realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022; dan
3. RKA K/L Tahun Anggaran 2023 Kementerian Perhubungan; serta
4. Usulan program-program yang akan didanai DAK, berdasarkan kriteria teknis dan dari komisi.

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002, 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 98 ayat (2) dan (3), serta peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Tata Tertib Pasal 59 ayat (2) dinyatakan bahwa tugas komisi dalam bidang anggaran meliputi di antaranya, membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja komisi dan mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP Tahun 2021, serta realisasi anggaran Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan BPK terhadap LKPP Tahun 2021, Kementerian Perhubungan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2022 sampai dengan Agustus sebesar, 52,60% sementara DAK afirmasi dan transportasi perairan perlu mendapat penjelasan secara komprehensif.

Terkait dengan agenda berikutnya yaitu pembahasan RKA K/L masing-masing Kementerian pada Tahun Anggaran 2023 perlu kiranya kita bangun kesepahaman bersama bahwa rapat kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023, yang telah kita laksanakan pada bulan Juni 2022 yang lalu.

**Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri yang kami hormati,**

Dalam RAPBN Tahun 2023, Kementerian Perhubungan dalam RAPBN Tahun 2023 memperoleh anggaran sebesar 33,441 Triliun yang akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, utamanya di bidang infrastruktur transportasi. Kegiatan prioritas Tahun 2023 tersebut

dilaksanakan melalui program infrastruktur konektivitas dengan *output* prioritas antara lain:

1. Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai tema RKP Tahun 2023, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar belanja Kementerian Tahun 2023 diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung percepatan infrastruktur konektivitas, dan infrastruktur padat karya;
2. Perlunya mendorong peningkatan kualitas SDM dibanding di bidang perhubungan, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, serta mendorong *stakeholder* untuk berpihak pada pengembangan infrastruktur konektivitas di daerah tertinggal untuk mengurangi keterisolasian;
3. Perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan tol laut guna mengoptimalkan konektivitas logistik sampai ke daerah-daerah pedalaman, terpencil dan pulau terluar dalam rangka pemerataan dan kesenjangan ekonomi dan pembangunan ekonomi antar wilayah;
4. Perlunya mendorong partisipasi swasta dalam merancang percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas mengingat kebutuhan pembiayaan yang sangat besar, sementara ruang kapasitas fiskal sangat terbatas.

**Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri yang kami hormati,**

Demikian pengantar dari kami. Kami persilakan kepada Bapak Menteri Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini. Kami persilakan, Pak.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, Pak Pimpinan, Pak Ridwan Bae.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore,

Salam sejahtera,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo Buddhaya, dan

Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan Komisi V,
Yang saya hormati para Anggota Komisi V, dan
Hadirin yang berbahagia,**

Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita bisa melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI, dengan agenda:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021;
2. Realisasi APBN Tahun 2022;
3. Pembahasan RKA K/L Tahun 2023 dalam Nota Keuangan RAPBN 2023; serta
4. Usulan program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dan komisi.

Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sistematika pembahasan, satu adalah laporan keuangan 2021, yang kedua Realisasi Anggaran '22 sampai dengan bulan Agustus, rencana RKA 2023 dan nota keuangan dan pembahasan program yang didanai oleh DAK.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Memasuki agenda pertama yaitu Laporan Keuangan Anggaran 2021. Saya sampaikan bahwa, amanat Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perhubungan Udara, Peraturan PP 8 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta PP Keuangan atau PMK 22/2016 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Laporan Keuangan Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban APBN setiap kementerian, negara wajib melaporkan laporan kepada bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat meliputi realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Sebagai salah satu entitas memiliki kewajiban, maka Kementerian Perhubungan menyampaikan dokumen laporan secara lengkap dan tepat waktu.

Selanjutnya, setelah melakukan penelitian pemeriksaan, *alhamdulillah* Kementerian Perhubungan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan 2021. Ini merupakan pencapaian yang berturut-turut yang ke-sembilan kali, sejak Tahun 2013 dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dan penatakelolaan keuangan masa yang akan datang.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya, mendapatkan gambaran singkat berkaitan dengan apa yang menjadi ikhtisar Laporan Keuangan 2021 yang auditif. Pertama adalah Laporan Keuangan 2021 Realisasi PNPB 2021 tercapai 93,8% mengalami penurunan dibandingkan 2020 karena memang adanya covid, namun dari nilai Realisasi 2021 meningkat dibandingkan 2020, yaitu ya 7,7 menjadi 7,9. Sedangkan, Realisasi Belanja dari 32 Triliun turun menjadi 34,7 namun dari Realisasi Kinerja kami mencapai 97,2% dibandingkan dengan Tahun 2020.

Kedua, neraca dan ekuitas penurunan menjadi 511 Triliun dan dari 2020 517, kemudian kewajiban menjadi 2010, 2021 menjadi 2000, *eh* 210 Miliar dibandingkan 2020, 234 Miliar. Terakhir, ekuitas 2021 tercatat 512 Triliun atau mengalami penurunan dibandingkan 2020, 517.

Ketiga adalah laporan operasional Kementerian Perhubungan. Kita catat bahwa, defisit operasional sebanyak 28 Triliun, turun dibandingkan 2020 34 Triliun, sedangkan kegiatan non operasional mengalami defisit sebanyak 947. Lalu kami laporkan juga hal berkaitan dengan perubahan ekuitas. Ekuitas itu naik menjadi 517 dibandingkan 2020, 513.

Selanjutnya, saya menyampaikan catatan atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2021. Setelah melakukan peninjauan dan pemeriksaan BPK, Kementerian Perhubungan melakukan koreksi penyajian pengungkapan laporan keuangan terdiri dari anggaran, neraca ekuitas, serta laporan operasional.

Realisasi Anggaran PNBPN mengalami penurunan 256 Miliar atau 3,3 faktor naiknya realisasi dibanding 20 adalah adanya relaksasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, optimasi daripada BUMN, dan adanya pembayaran piutang Sertifikat SURT, ya dan meningkatnya jasa pelabuhan navigasi. Selain itu, Presentasi Belanja 2021 mengalami peningkatan.

Lalu kami laporkan juga berkaitan dengan neraca dan ekuitis poin ekuitas. Kenaikan neraca aset lancar sebesar 185 Miliar, yaitu adanya peningkatan nilai persediaan yang diserahkan kepada Pemda berupa bus, kapal, dermaga, rambu, dan kegiatan yang lain.

Laporan operasional pendapatan PNBPN *akrual* mendapat peningkatan 819 sejalan dengan peningkatan PNBPN secara *cash*, sehubungan dengan adanya relaksasi PPKM, serta peningkatan pelayanan transportasi penumpang dan barang, sedangkan operasional menurun 5,15 Triliun.

**Bapak-Ibu Pimpinan Komisi V, dan
Para Anggota Komisi V yang saya hormati dan saya banggakan,**

Berkaitan dengan pembahasan kedua, Realisasi Anggaran Kementerian Perhubungan. Dapat saya sampaikan Pagu Anggaran 2022 sebesar 32,94%. Selanjutnya, adanya *automatic adjustment* 21, 2,1 Triliun, penambahan anggaran sebanyak 1,22; rekomposisi 9,4; pengurangan anggaran 67 Miliar, telah berubah anggaran kementerian pada Pagu akhirnya adalah sebanyak 31,94 Miliar.

Sampai dengan 22 Agustus, realisasi kinerja keuangan sebanyak 52% senilai 16,8 Triliun, kami optimis bahwa di akhir 2022 kita dapat mencapai 95,9. Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan belanja pegawai mencapai 67,4%, belanja barang 50,6% dan belanja modal 50,6%.

Bapak Pimpinan,

Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya banggakan,

Berkaitan dengan PNBP sampai dengan 22 Agustus sudah mencapai 5,3 Triliun atau 62% dari target 8,5 Triliun, dengan realisasi PNBP Perhubungan Laut sebanyak 2,9 Triliun. Dari realisasi tersebut, PNBP fungsional sebanyak 4,9 Triliun dan non-fungsional 330 Miliar.

Realisasi PNBP sampai dengan 22 Agustus mencapai 2,2 Triliun dari Pagu 5,4 Triliun, sehingga belanja barang 41% dan belanja modal 39%. Jadi, PNBP ini juga kita bisa gunakan untuk kegiatan pembangunan pada tahun berjalan, kami sedang mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar persentase dari penggunaan PNBP minta ditingkatkan dan di sisi lain kami juga berusaha untuk meningkatkan PNBP kita, sehingga secara akumulatif bisa menambah anggaran APBN dari Kementerian Perhubungan.

**Bapak,
Bapak Ketua dan Bapak-Ibu wakil,
Bapak-Bapak-Ibu Anggota Komisi V,**

Adanya *automatic adjustment* mempengaruhi struktur anggaran fiskal Kemenhub dalam prioritas nasional. *Nah*, oleh karenanya, beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah

1. Melakukan *monitoring* dan pengawasan internal secara intensif terhadap satker;
2. Pengetatan rencana penarikan dana dan memastikan rencana sesuai target;
3. Melakukan percepatan pelaksanaan program kegiatan, pengadaan barang jasa dan meningkatkan kualitas belanja barang melalui efisiensi dan integritas. Segera merevisi sisa kontrak, dan membuka tanda blokir. Jadi, biar maksimalisasi ruang fiskal;
4. Memanfaatkan fasilitas *automatic adjustment* untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, mengusulkan *switch* penggantian kegiatan prioritas penting dan mendesak;
5. Meningkatkan koordinasi dan *monitoring* guna mendorong percepatan pencapaian Target Pagu Penggunaan dan Realisasi PNBP dan BLU dapat tercapai.

**Bapak-Bapak Pimpinan,
Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati, dan
Hadirin yang saya banggakan,**

Beberapa hal yang menjadi agenda, berkaitan dengan anggaran nota keuangan RAPBN Tahun 2023 dapat saya laporkan sebagai berikut dan ini adalah merupakan *mandatory* untuk mendukung beberapa infrastruktur dasar dan prioritas *major project* adalah:

1. Kereta tinggi kecepatan tinggi Pulau Jawa, Jakarta-Bandung;
2. Pengoperasian kereta api Makassar-Parepare;
3. Pengembangan pelabuhan utama terpadu;
4. Pengangkutan, sistem pengangkutan massal di perkotaan.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut apa arahan presiden bahwa sektor fiskal 2023 dirancang memperkokoh pondasi perekonomian, pembangunan infrastruktur dianggarkan 392 Triliun untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur, konektivitas dan mobilitas.

Penyediaan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau dan handal dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK, maka rencana kegiatan perhubungan RKP dengan tema peningkatan produktivitas untuk transportasi ekonomi, transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan pengalokasian 2023 antara lain:

1. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi produktif mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Mendukung keberlanjutan dari layanan transportasi bagi masyarakat;
3. Mendukung program peningkatan SDM sektor transportasi melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi;
4. Mendukung pemerataan pelabuhan nasional, membantu masyarakat ekonomi lemah dan menyentuh daerah terpencil, terluar, terdepan, dan membuka keterisolasian daerah melalui pemberian subsidi, PSO dan angkutan perintis, tol laut, dan jembatan udara;
5. Melaksanakan program pro kerakyatan, mendukung PEN melalui skema padat karya dan memberdayakan masyarakat;
6. Memastikan keberlanjutan program P-ANJI pemenuhan PN dan PSN yang tertunda selama pada 2020 dan 2021;
7. Mendukung dan memprioritaskan kegiatan infrastruktur transportasi yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan operasional perkantoran;
8. Mendukung program perencanaan pembangunan IKN;
9. Mendukung inovasi, digitalisasi, pelayanan perizinan, serta *creative financing* melalui PNBP pemanfaatan aset secara maksimal, mendorong PPP *proyek* dan peran swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur transportasi; dan
10. Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Selain kebijakan di atas, Kemenhub juga berkomitmen memberikan dukungan pada pengembangan KEK, kawasan industri destinasi pariwisata super prioritas daerah terpencil, perbatasan, Inpres percepatan pembangunan berbasis kewilayahan.

**Bapak-Bapak Pimpinan, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya banggakan,**

Selanjutnya, bersama dengan surat Menteri Keuangan, Menteri PPN Nomor: S-617/MK.02/2020 dan surat 27 Juli Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan 2023 sebanyak 33,4 Triliun dapat kami sampaikan secara garis besar bahwa rencana Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Kebutuhan 2023 pada dasarnya dari 2020-2024 sebanyak 75 Triliun dengan Pagu Indikatif sebanyak 33 Triliun, selanjutnya ditetapkan anggarannya adalah 32,44 dengan komposisi belanja operasional 21%, nonoperasional sebanyak 2, 78%.

Berdasarkan jenis untuk Belanja Pegawai 3,8 Triliun, Operasional 34 Triliun, Belanja Non-Operasional 26 Triliun, Sumber Rupiah Murni 19 Triliun, PNPB 3,6 Triliun, BLU sebanyak 1,4 Triliun, PHLN sebanyak 518 Miliar, SBSN 8,7 Triliun dan jika di, terdiri dari sektor-sektor, Setjen 541 Miliar, Irjen 96 Miliar, Irjen darat sebanyak 5,4 Miliar, udara, laut sebanyak 8,7 Triliun, udara sebanyak 7,1 Triliun, kereta api sebanyak 7,2 Triliun, BKT sebanyak 164 Miliar, BBSN 3,6 Triliun, BPTJ sebanyak 259 Miliar.

Tentunya rencana kerja anggaran yang disusun ini telah mempertimbangkan pelaksanaan program kegiatan Strategis Sektor Transportasi Nasional 2023 adapun rincian kegiatan sektor transportasi yang akan dilaksanakan Tahun 2023 di antaranya pembangunan transportasi infrastruktur meliputi enam bandara, 18 bandara terpencil, pengembangan, pengembangan pelabuhan 18 lokasi, jalur kereta api 89 Kilometer, tol laut, perintis laut, program jembatan udara, pengadaan keselamatan jalan, ATCS dan juga pemberdayaan masyarakat, vokasional untuk masyarakat menyusun formulasi kebijakan transportasi program padat karya yang berbasis Anggaran Reguler 2023.

**Bapak-Bapak Pimpinan, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi V, dan
Teman-teman sekalian,**

Memasuki agenda keempat yaitu, pembahasan usulan program yang didanai DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PMK 198 pengelolaan DAK fisik sebagai salah satu pengampu pelaksanaan DAK di mana Kemenhub memiliki tugas untuk melakukan penilaian dan verifikasi terhadap usulan daerah yang sudah disampaikan melalui aplikasi KRISNA sesuai dengan kriteria teknis.

Pada Tahun 2022, arah kebijakan DAK adalah peningkatan konektivitas wilayah untuk penggunaan inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Menu DAK terdapat 2, rehabilitas, fasilitas pelabuhan dan pengadaan sarana moda, transportasi perairan dan alokasi anggaran 484 Miliar pada 96 prioritas.

Selanjutnya, untuk arah kebijakan DAK 2023 adalah peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi, terdapat dua menu DAK di 2022 indikasinya adalah 619 Miliar tersebar di 76 lokasi prioritas, 16 Provinsi dan 36 Kabupaten/Kota. Dari 76 lokasi DAK transportasi perairan terdapat 38 daerah yang dapat dilanjutkan pembahasan di tahap penilaian sinkronisasi dan harmonisasi dengan alokasi kebutuhan.

Bapak-Bapak Pimpinan,

Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,

Demikianlah kami sampaikan terkait laporan RAPBN 2021, Realisasi Anggaran 2022 dan RKA 2023. Selanjutnya, kami mohon arahan dan masukan dari Bapak-Ibu sekalian berkaitan dengan kinerja Kementerian Perhubungan di masa mendatang.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Menteri.

Sekarang kita sudah, waktu kita menunjukkan jam 4 lewat 30 menit, ya mudah-mudahan kita menyampaikan yang penting-penting saja sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri tadi.

Sebagai, sebagaimana data yang ada di sini, yang pertama memberikan masukan dan tanggapan adalah Pak Tamanuri.

Silakan, Pak Tamanuri.

F – P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pak Pimpinan, beserta wakil,
Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Dewan,
Yang terhormat Pak Menteri, serta
Para jajaran Eselon I,
Hadirin berbahagia,**

Setelah mendengarkan apa yang disampaikan laporan oleh Bapak Menteri tadi, kami bisa memahami bahwa memang kondisi dan situasi yang mengharuskan kita harus seperti itu, karena adanya *refocusing-refocusing* sehingga agar kita selalu menurun terpaksa juga hasilnya demikian juga.

Saya tidak begitu terikat pada itu, yang perlu saya sampaikan adalah hal-hal yang sekarang saya hadapi di lapangan. Pertama kali perlu diperhatikan lagi Pak Menteri, bahwa terminal yang baru saja direhab pada tahun yang lalu, Terminal Rajabasa, itu kondisinya luar biasa itu, jalan-jalan di dalamnya sendiri platarnya sudah sangat banyak yang rusak dan lubang-lubangnya besar-besar sehingga banyak sekali bus-bus yang besar itu bukannya di dalam terminal tapi di tugu (suara kurang jelas) mereka menaruh mobil, mobil-mobil mereka.

Yang kedua, perlu Pak Menteri perhatikan bahwa apa ini pelabuhan-pelabuhan rakyat, soalnya *nggak* mungkin itu menggunakan pelabuhan Bakauheni, tentunya rakyat ini punya pelabuhan-pelabuhan sendiri untuk mengangkut hasil-hasil ekonomi mereka dan ini kelihatannya sudah sangat memprihatinkan. Nah, sebelum dia apa itu mendapat, apa, ada korban di situ, harapan saya adalah supaya dapat segera dalam anggaran ini diadakan renovasi.

Kemudian, saya perlu juga sampaikan di sini, ya tidak ada *tedeng aling-aling*-lah langsung-langsung aja, mohon maaf Pak Menteri. Ini, kerjaan ini bagi kami ini Tahun 2023 nih, habis kami sudah menghadapi Tahun 2024, ya minta dibantulah Pak Menteri, bantu supaya kita bisa bersama lagi di senayan ini. Dengan bantuan Pak Menteri, apa melihat berupa yang kecil-kecil aja lampu jalan di desa-desa, kemudian apa jalan-jalan lingkungan atau yang mana yang mana yang tadi Bapak Menteri sampaikan tapi minta kepastian, hanya itu Pak Menteri, yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wah, menarik sekali ini Pak Tamanuri punya ini dan Pak Menteri saya lihat senyum-senyum sedikit, Pak.

Silakan Pak Eddy Santana, Pak. Silakan, Pak.

F – P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan Komisi V yang saya hormati, beserta
Teman-teman sekalian Anggota Komisi V DPR RI,
Pak Menteri Perhubungan dan para Pejabat Eselon I, dan
Seluruh jajaran yang sempat hadir ataupun juga yang melalui ada, online
ya Zoom,**

Pertama Pak, langsung saja saya ya. Ini ada aspirasi itu ketika saya mengunjungi Bandara Silampari gitu ya dan berkumpul di situ para honorer gitu Pak ya, honorer. Banyak, ada dokternya dan keluhan mereka itu ketika honor ini, pegawai honor dihapuskan ke mana mereka, apakah tetap mereka itu bisa bekerja, *ndak* masalah misalnya *outsourcing*, tetapi *outsourcing* itu terbatas Pak, di apa di *cleaning service* bisa, di *security* bisa, ada di administrasi ini, nah ada kesulitan mungkin nantinya itu.

Nah, mohon ini ya dari Kementerian Perhubungan mohon ini betul-betul ini, ini menyangkut menyangkut nasib Pak, nasib keluarga gitu ya, pendapatan

keluarga, ekonomi keluarga, kalau mereka sampai keluar alangkah ya *nggak* tau, zholimnya kita di sini. Ini yang harus, yang ada itu tolong diperjuangkan, bahkan mereka termasuk juga mengeluhkan lambatnya pendapat gaji mereka, gaji honor mereka bulanan gitu, tetapi saya tanya tadi udah selesai dari diambil dari PNBPN, ya.

Nah, itu-itu *ndak* masalah saya bilang sama saja, yang penting kamu gajian gitu ya. *Nah*, ini mohon ini benar-benar bukan hanya di situ saja, pasti seluruh Indonesia itu, pasti seluruh Indonesia, ini-ini-ini bagaimana gitu selanjutnya itu nasib mereka itu mohon diperhatikan.

Nah, yang kedua, di bandara itu kalau saya lihat tadi untuk 2023 juga sekilas itu ada, ada 7 Triliun untuk, untuk apa, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ini berkali-kali kami mohon dukungan gitu, supaya bandara itu bagus, saya tidak pernah menyebut bandara Palembang gitu ya, karena itu memang sudah bagus, sudah inilah angkasa pura yang mungkin berperan di situ, tapi untuk bandara Silampari Lubuklinggau kita minta 48 Miliar aja sulitnya susah. *Nah*, mohon ini untuk pengembangan *apron*, *taxiway*, bahkan mungkin kalau lahan udah beres semua, saya dengan walikota, Walikota Lubuklinggau untuk perpanjangan *runway* juga bisa.

Kita persiapkan bandara, bandara kedua yang baiklah, yang baguslah, juga percepatan untuk mendorong mereka mungkin ada pemekaran provinsi nanti. Saya mendukung, mendukung pemekaran provinsi untuk Sumatra Selatan Barat. Kenapa? karena akan lebih cepat maju, mereka akan lebih cepat sejahtera dan Lubuklinggau tuh, udah siap semua infrastruktur udah siap, ya pelayanan kesehatan, pendidikan, kotanya gitu ya, ekonominya bagus, ya. Ini-ini yang yang menjadi perhatian, kami mohon Pak Menteri, gitu ya. Mungkin mapnya udah sampai gitu, tapi *nggak* ada sama sekali disebut-sebut di sini apa disinkronisasi nanti gitu ya, tapi itu sedikit sekali dan bandara itu jadi bagus gitu, 48 Miliar itu, mungkin dari 7 Triliun itu merem ajalah, sedikit.

Nah, yang ketiga, ada ini juga banyak yang menyampaikan Tanjung Carat, *scheme* Tanjung Carat. Apakah ini sudah benar gitu, akan berhasil, diserahkan ke BUMD, sedangkan BUMD aja *nggak* pernah dengar orang BUMD itu, apa bisa bangun Tanjung Carat gitu ya.

Nah, apakah ada kontrak gitu, atau ada, ada perintah dari Menteri Perhubungan ke BUMD tersebut ya untuk, tentunya ada batasan waktu, misalnya enam bulan atau setahun, kalau *ndak* ada gerak 6 bulan ya harusnya dicarikan *scheme* lain untuk pendanaan gitu.

Saya terus terang mengharapkan di situ masuk APBN, gitu, APBN walaupun berapa saja gitu. Dulu, yang penting ada masuk itu, begitu masuk berarti kita sudah mulai *start* untuk pembangunan di Tanjung Carat itu tersebut, jadi bisa kita, bisa kita apa sosialisasikan Tanjung Carat jadi dibangun, sudah mulai dibangun, kalau sekarang Pak, masih, masih di awang-awang. Ini saja, Pimpinan.

Nah, satu lagi maaf, aspirasi ini. Ini yang kita juga sering dikeluhkan apa sih oleh-oleh dari Kementerian Perhubungan untuk, untuk daerahnya gitu itu yang bisa dibawa, sehingga kami punya dapat nama gitu sih. Misalnya paling gampang itu adalah lampu penerangan jalan umum. *Nah*, ini nih, apa berapa ratus titik itu bisa kita bawa ke daerah gitu ya, nah ini mohon juga ini dibicarakan secara detail, secara khusus.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Pak Eddy, terima kasih.

Ibu Sadarestuwati, siap-siap Pak Boyman Harun.

F – PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V, dan juga
Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran,**

Yang pertama, saya mohon maaf dan mohon izin untuk keluar dari pembahasan pada sore hari ini. Ini karena ada kejadian kecelakaan Bapak, ini tadi baru saja di WA disuruh menyampaikan di dalam forum rapat ini, kecelakaan yang melibatkan kendaraan *overload*, *over* dimensi.

Nah, yang menjadi persoalan di sini kendaraan ini sudah-sudah ODOL, tetapi juga kendaraan yang dengan plat nomor Surabaya ini ternyata melakukan uji kelaikan jalan, uji KIR, itu di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati tanpa membawa kendaraan. Jadi, kendaraan ini tidak pernah dibawa untuk diuji, akan tetapi bisa keluar uji KIR-nya.

Nah, ini dari Polres yang menyampaikan agar disampaikan, kiranya nanti bisa menjadi koreksi bersama dan tidak terulang. Jadi, mungkin nanti perlu ada sosialisasi dan kami ingin tau, apakah memang diperkenankan untuk uji KIR itu tanpa harus membawa kendaraannya? Dan, apa juga diperbolehkan untuk lintas daerah?

Kemudian yang kedua Bapak, sama seperti halnya teman-teman, akan tetapi saya terima kasih banyak karena sudah cukup banyak dibantu untuk program-program, namun kiranya menghadapi 2024 kami tentunya masih

sangat banyak membutuhkan berbagai program yang sekiranya nanti bisa langsung memberikan manfaat untuk rakyat.

Seperti halnya pengadaan bus yang mestinya bisa untuk diadakan lagi ya, diadakan lagi karena itu juga ternyata sangat memberikan manfaat di daerah. Yang mana kita ketahui hampir semua daerah sekarang mengalami apa ya, untuk mendapatkan kendaraan yang angkutan umum itu sekarang sudah sulit, khususnya untuk daerah desa-desa antar kecamatan untuk menuju kota, ini ternyata sudah sangat sulit.

Contoh kasus di tempat saya sendiri yang dulu itu ada jurusan Kemojo Agung, ada yang melalui dua jalur kemudian langsung ke Jombang, ternyata sekarang hanya di jam-jam tertentu, itu pun hanya ada dua atau tiga angkutan, sehingga ini menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar bagi anak-anak kita. Karena mereka tidak mungkin kita biarkan untuk telat sekolah terus gitu, ini yang untuk kendaraan.

Begitu juga untuk kendaraan angkutan apa yang, yang antar, angkutan sekolah tetapi bukan dibantukan di sekolahnya tetapi dioperasikan oleh Pemerintah Daerah seperti yang lalu-lalu, ini juga sangat perlu karena juga memang tidak mungkin semua sekolah akan diberi bantuan kendaraan ini.

Kemudian, berkaitan dengan BTS, ini mohon izin Pak Menteri, semua mempertanyakan terkait dengan BTS, tentunya kalau ini kami mohon lebih diberikan penjelasan yang lebih detail lagi, karena apabila memang itu tidak memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat kiranya bisa dievaluasi lagi. Saya kira itu saja dari saya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Silakan, Pak Boyman Harun.

F – PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati dan yang saya banggakan,
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati dan saya banggakan,**

Langsung saja, Pak. Saya terlalu sering di WA sama Bupati Kayong Utara, Pak, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, bahwa Pak Bupatinya menyampaikan kepada saya bahwa progres berkaitan dengan masalah pembebasan lahan itu sudah hampir selesai Pak, masalah pembangunan bandara yang di Kayong Utara. Untuk itu, melalui Komisi V ini berharap kepada Bapak Menteri dan Bapak Dirjen agar memberikan penjelasan gimana kelanjutan dari pembangunan bandara yang ada di Kayong Utara, itu yang pertama, Pak.

Kedua, saya ingin menyampaikan juga berkaitan dengan masalah terminal, terminal yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terminal penumpang Pak, penumpang bandara. Itu sudah tidak memenuhi syarat, Pak. Kemarin saya sudah usulkan juga agar diadakan renovasi berkaitan dengan terminal tersebut atau optimalisasi, artinya tidak perlu membangun yang baru, tidak perlu membangun yang baru, tetapi adakan renovasi agar lebih baik daripada yang sekarang, itu yang kedua.

Yang ketiga, Pak. Kami ingin mendapat penjelasan dari Bapak berkaitan dengan masalah harga tiket Pak, khususnya yang ada di Kabupaten Ketapang. Biasa-biasanya Pak, selama ini kami kalau berangkat Ketapang – Pontianak itu atau Pontianak – Ketapang harga tiket itu paling tinggi biasanya berkisar 600 atau 700 Pak, ribu, 600 atau 700 ribu, sekarang sudah hampir 1 Juta lebih Pak. Walaupun kita tahu secara undang-undang mengatakan ada batas bawah dan batas atas, tetapi saya pikir ini kenaikan harga tiket ini tidak lepas karena armadanya cuma satu, Wings aja yang ada di Ketapang dan Pontianak, kalau ada armada yang lain harganya tidak segitu.

Jadi menurut saya, ini perlu kehadiran Pemerintah untuk mengambil jalan tengah agar perusahaan itu tidak semau-maunya saja untuk menaikkan harga tiket walaupun secara aturan itu dibolehkan, itu mengeluhnya sudah luar biasa Pak, masyarakat di sana dan saya sudah juga ada WA dengan Pak Novie untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Untuk itu, saya minta kepada Bapak Menteri agar melakukan peninjauan langsung berkaitan dengan harga tiket yang ada di Kalimantan Barat.

Kemudian Pak, yang keempat, saya tetap mengingatkan agar usulan-usulan kami berkaitan dengan aspirasi Pak, halte Pak, halte, halte sungai, karena kami Kalimantan Barat itu hampir seluruhnya itu dikelilingi oleh sungai. Artinya, transportasi sungai itu adalah merupakan transportasi yang mayoritas digunakan oleh orang Kalimantan Barat, selain transportasi darat. Mengingat transportasi darat kami ini kan kondisi jalannya kan sangat susah sekali Pak, artinya walaupun ada jalannya itu jalannya ya, tidak bisa dilalui seperti jalan-jalan yang ada di pulau Jawa ini, tetapi jalannya tanah, lumpur, bahkan kalau kita mau menuju ke satu daerah bisa sampai satu dua hari baru nyampe karena mobilnya amblas.

Untuk itu, alternatifnya harus sungai, maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya tetap mengusulkan untuk 2023 ini, halte sungai agar diprioritaskan, khusus yang ada di Kalimantan Barat. Untuk itu, atas izin Pimpinan saya tetap mengusulkan kepada Bapak Menteri usulan berkaitan

dengan masalah halte sungai ini supaya tidak lupa, Pak. Sebab kalau ngomong-ngomong begini mungkin kalau *nggak* dicatat atau catatannya kertasnya kecil takutnya hilang, makanya saya agak beri kertas yang besar pakai map semoga tidak lupa. Boleh Ketua, saya serahkan? Baik itu saja Pak Menteri.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Interupsi. Interupsi, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Syarif.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Terima, langsung aja ya Pak Ketua, langsung?

KETUA RAPAT:

Kalau bisa biar Pak Boyman serahkan dulu baru interupsi, Pak. Kasihan Pak Boyman terganggu waktunya.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Saya kira tadi interupsinya Pak Syarif itu, Pak Boyman *nggak* boleh ke depan gitu, kalau gitu saya mau protes.

KETUA RAPAT:

Tolong fotonya.

Makasih, Pak Boyman. Silakan, Pak Syarif.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Terima kasih. Terima kasih, Pimpinan.

**Pak Menteri yang saya hormati, serta
Rekan-rekan,**

Berkaitan dengan rapat kita hari ini. Tentu ada beberapa tadi disampaikan oleh Pak Menteri, berkaitan dengan pemaparan terhadap program 2023, tapi saya kembali mengingatkan bahwa kita itu kan ada prioritas, paling tidak ada tiga prioritas di dalam penentuan anggaran, ya. Salah satunya itu adalah dari aspirasi Anggota DPR berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan di Dapil, ya. Termasuk kegiatan reses dan sebagainya. Karena ini merupakan dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

Sehingga, dengan demikian bahwa DPR itu fungsi terhadap salah satu fungsi anggaran berkaitan dengan ini, ya, tentu masyarakat punya tumpuan berkaitan dengan apa yang dilakukan baik kunjungan reses maupun kunjungan Dapil DPR. Maka waktu itu saya lihat, dengan ada beberapa, telah kalau di pemaparan ini dan memang selama ini kita rasakan terutama di Kementerian Perhubungan ini memang terhadap mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan oleh Anggota DPR itu, memang masih belum sebegitu maksimal.

Sehingga dengan demikian, tentu ini pertanggungjawaban moral Anggota DPR berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai utusan dari masing-masing daerah. Makanya DPR itu, Anggota DPR itu berdasarkan Dapil di dalam pencalonannya, apa itu maksudnya supaya bisa dalam rangka memperjuangkan terhadap apa yang menjadi, yang harus menjadi perjuangan Anggota DPR.

Untuk itu maka saya lihat tadi berapa yang disampaikan seperti ini, ini tentu harus ada persamaan persepsi antara DPR bersama dengan Pemerintah berkaitan dengan ini, sehingga apa yang menjadi harapan itu bisa terealisasi di dalam perjuangan anggaran ini. Maka untuk itu saya menilai seperti ini, sebaiknya ini harus menjadi pembicaraan kita terlebih dahulu. Saya lebih cenderung rapat hari ini kita skors terlebih dahulu, berkaitan dengan ini, ya karena terus terang saja, ya, apa yang disampaikan Pak Boyman itu kan beberapa kali juga sebenarnya, tetapi juga tidak muncul di situ dan itu merupakan keputusan rapat kita, itu baru yang kecil saja, maka saya kira, saya lebih cenderung rapat ini ya kita skors terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi kita, jangan hanya satu pihak gitu.

Karena ini dijamin oleh konstitusi dan MD3 juga menyambut, me, apa menjamin, itu diatur di MD3. Saya kira itu saja, Pak. Saya usulkan rapat ini diskors terlebih dahulu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kurang jelas Pak Syarif pertanyaannya, mau diskors untuk apa, kita skors untuk kita diam atau kita bicara, bagaimana maksudnya?

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Saya kan sudah saya sampaikan Pak, menyamakan persepsi terhadap anggaran ini. Ya kan *nggak* perlu saya jelaskan lebih mendetail persepsi terhadap ini, saya kira itu.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya, penyampaian aspirasi kan sudah sama juga Pak Tamanuri tadi, Pak Boyman juga seperti itu dan sudah didengarkan juga oleh Pak Menteri, tapi namun demikian ya, saya sebagai Pimpinan kan bisa diskusi bersama unsur Pimpinan, sekaligus saya minta tanggapan yang lain. Silakan Pak ada yang mau memberikan tanggapan? Karena kita Pimpinan ini hanya *anu* aja ini, kita ini sebagai pengatur-pengatur lalu lintas pembicara kita ini, yang pada akhirnya terserah Anggota, tapi bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Pak Tamanuri tadi, Pak Boyman tadi ya itu sudah mencakup Pak, penyampaian aspirasi. Nanti kita perdalam pada waktu dengan para Dirjen tentang persoalan apa masuk apa tidak masuk gitu usulan kita gitu, tapi namun demikian.

F – PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak, Pak Syahrul Aidi silakan.

F – PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Setuju untuk kemudian kita samakan persepsi. Karena begini, saya sudah boleh dikatakan delapan kali saya ngantarkan map ini ke depan. Sudah puluhan usulan yang saya usulkan, hanya satu, setahu saya yang terpenuhi selama ini sudah tiga tahun kita di DPR ini. Ternyata yang lebih diprioritaskan itu adalah program yang tidak ada sangkut pautnya dengan Dapil kita.

Saya kaget ketika pembahasan dengan Dirjen Perhubungan Darat ketika pra-pembahasan kita kemarin, ketika kita menerima Pagu Indikatif, itu peningkatan untuk program BTS misalnya, *By The Service*.

Tahun 2020, itu ada sekitar 200 Miliar, 2021 naik menjadi hampir 300 Miliar, 2022 itu 500 Miliar. Saya lihat 2023 programnya masih ada lagi, itu 500 Miliar. Kita untuk minta perbaikan terminal saja sampai sekarang *nggak* berjalan, *nggak* ada. Kita minta program untuk penerangan juga tidak ada, bus tahun kemarin kita tidak dapat, sementara ini 500 Miliar digelontorkan di sini.

Kemarin ketika kita rapat dengan Plt. Dirjen Perhubungan Darat beliau menyampaikan bahwasanya jawaban-jawabannya tidak memuaskan, banyak teman-teman Komisi V ini melihat program ini di daerah ternyata itu tidak memberikan dukungan untuk membantu masyarakat, karena kosong pergi, kosong pulang kosong.

Nah, ini bahkan kemarin disinggung oleh Pak Ketua, Pak Lasarus, program *By The Service* ini dilakukan oleh pihak ketiga itu, Pemerintah menggelontorkan dana satu kota itu 50 Miliar, mau jalan atau tidak jalan, mau ada orang atau tidak ada itu habis duit 50 Miliar satu kota.

Saya waktu itu, saya dan Ketua juga meminta waktu itu untuk Kota Pekanbaru saya minta Pemerintah Daerah sudah membuat subsidi, tolong bantu 10 Miliar saja, dua tahun saya meminta sampai sekarang tidak bisa. Saya tidak tau apa dasarnya ini dapat, yang Kota Pekanbaru tidak dapat misalnya.

Nah, saya maka perlu ini didudukkan, Ketua. Saya sudah bosan sebetulnya nulis map, menandatangani berapa kali tapi tidak pernah terealisasi. Jadi, sangat setuju kalau ini kemudian kita bersama-sama duduk bersama memberikan pemahaman yang sama bahwasanya kewenangan kita adalah untuk salah satu tugas kita adalah *budgeting*, penganggaran, kita yang mensahkan, agak miris juga mendengar minta kepada Menteri, ini, minta-minta seolah-olah yang punya kewenangan penganggaran itu adalah Menteri, padahal kewenangan penganggaran itu adalah DPR sesuai yang disampaikan oleh Pak Syarif.

Ini betul-betul kita duduk bersama ini, menyamakan persepsi, Pak Ketua. Barangkali itu yang saya dapat saya sampaikan.

KETUA RAPAT:

Sarannya apa maksudnya?

F – PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Ya kita duduk bersama, Ketua. Ini bagaimana ini 500 Miliar bisa terlaksana, kita.

KETUA RAPAT:

Skors, mau diskors, kemudian dibicarakan maksudnya?

F – PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Kemudian yang lain tidak bisa.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Interupsi, Ketua. Izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Jadi saya pikir gini aja Ketua, tadi kan dengan Kemendes kita sudah terjadi Raker juga, jadi kita ikuti aja tradisi kemarin dengan perhubungan juga kita lakukan hal yang sama, itu aja Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Boleh *nggak* saya cerita sebentar. Apa bedanya anti dengan bosan. Kalau anti, anti Budi Karya kita jelaskan Pak, Budi Karya itu bagus sekali, semua aspirasi anggota DPR semua dipenuhi sehingga mereka tidak anti. Kalau bosan, ada pria datang ke dokter, *tap*, bicara dia keluhannya tidak bangun-bangun yang di bawah itu, dikasih, dikasih dokter setengah biji viagra, besok datang lagi bagaimana? Tidak bangun juga. Oh tambah dosisnya satu biji, besok hari datang lagi tidak bangun juga. Maksimal ini katanya satu setengah biji, dokter tanya kalau perempuan yang lain mau bangun *nggak*, si pasien bilang, mau bangun. Jadi, bosan itu tidak ada obatnya, kecuali ada pilihan-pilihan baru.

Ya begitu mungkin, kawan-kawan sudah bosan Pak Menteri menyampaikan aspirasinya, saya juga sudah banyak map-map berkeliaran kepada Dirjen ini, Dirjen itu, Dirjen itu. Saya bolak-balik dari, dari bandara tadi saya baca, *ndak* ada sama sekali usulan di Dapil saya itu masuk dalam bahan ini.

Jadi, kita ini kan Pak Menteri di sumpah, dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, bagi yang beragama Islam Demi Allah saya bersumpah, bagi yang Katolik Kristen Protestan jika Tuhan menolong saya, yang Hindu Budha, om om santi om, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk tujuan nasional.

Kalau suara rakyat saja tidak Bapak pakai, emang APBN ini punya Bapak? Bapak kan PNBPN, rakyat kami yang bayar. Pajak-pajak rakyat yang bayar. Ya, kalau ada program RPJM 80%, oke, tapi 20% dari APBN yang Bapak kelola 33 Triliun ini, ya dibicarakanlah teman-teman ini, jangan sampai mereka bosan menyampaikan apa namanya aspirasinya.

Saya tuh Pak Menteri, sampai meminta kepada seluruh tenaga ahli komisi, apa saja yang disampaikan oleh Pak Syarif. Pak Syarif ini Golkar, Pak.

PESERTA RAPAT:

Bukan Golkar, Nasdem.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Bukan, golongan keturunan arab. Jadi, menurut saya ya Kepala Biro perencanaan juga mesti catat betul, jangan Bapak, punya Bapak saja, yang Bapak sampaikan di sini.

Jadi menurut saya ya, diskors dulu untuk dibicarakan yang mana dapilnya betul, masuk *nggak*. Kalau perlu para Dirjen ini bawa laptop masing-masing, kita tanya mana yang usulan yang diserahkan oleh bolak-balik oleh kawan-kawan ini. Ini saya lihat teman saya sudah membawa map pula.

PESERTA RAPAT:

Tapi saya *nggak* bawa usulan, saya bawain, masalah yang saya bawa.

F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Jadi itu, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Sebenarnya begini ya, seperti disampaikan tadi bahwa Pimpinan itu kan hanya sebagai pengatur alur pembicara dalam forum ini, tapi dengan tidak bermaksud juga membela Pemerintah sebenarnya Pemerintah juga tidak juga ada niatan untuk mengabaikan kita, karena faktanya juga di seluruh provinsi kan sebagian juga program, di seluruh provinsi di Indonesia. Saya yakin sebagian program dari Kementerian Perhubungan.

Tapi namun demikian, forum seperti ini saya tanyai dulu kepada Anggota, bagaimana skors dulu barang 15 menit? Setuju. Namun demikian, saya tanyakan kepada Pak Menteri. Pak Menteri setuju skors 15 menit untuk membicarakan internal? Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Setuju, Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju, ya baik kita skors 15 menit tempatnya di mana? Ruang makan, tapi kalau bisa yang *anu* saja, yang poksi saja. Jangan ramai-ramai juga nanti waktunya makin lama kalau ramai, poksi saja yang pergi ke sana ya Kepada Pak Menteri.

Silakan, Pak. Saya skors 15 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 17.00 WIB)

PESERTA RAPAT:

Selesai ya ya.

KETUA RAPAT/F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si) – KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 17.15 WIB)

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore, dan
Salam sejahtera bagi kita semua,

Ya, menurut informasi dari Pimpinan yang tadi melakukan rapat skors ya, bahwa kelanjutan dari rapat ini, ya, terkait dengan APBN Tahun 2023 nanti mungkin kita para Kapoksi dan Anggota, kita perlu duduk bersama lagi ya, nanti kita cari waktu. Sudah ada pembicaraan, mudah-mudahan ada titik temu antara Pemerintah dengan teman-teman Komisi V terkait dengan, saya rasa tidak perlu lagi kita masuk terlalu dalam soal materi Pak Menteri, ya, kalau ada beberapa hal yang perlu Pak Menteri sampaikan terkait dengan agenda hari ini ya, karena nanti juga akan kita alami dengan para Eselon I, kan ini, kita akan lanjutkan RDP-RDP dengan Eselon I sebagai penjabaran dari raker pada hari ini.

Oleh karenanya, terkait hal-hal yang substantif terkait Direktorat Jenderal, saya rasa tidak perlu kita panjang lebar di sini nanti kita perdalami di ketika nanti kita rapat dengan para Eselon I, barangkali demikian, saya tawarkan begitu dulu teman-teman ya, ya setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Karena kalau dapat tadi kita sudah bicara sedikit dengan Pimpinan di sini sebelum maghrib sudah selesai. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi Pak Menteri terkait agenda hari ini. Saya persilakan, Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih.

**Pak Ketua dan Wakil Ketua, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Ya hari ini memang kami melaporkan berkaitan dengan, karena *by law* kita harus mendapatkan satu, atau kami melaporkan kinerja 2021 dan

alhamdulillah 2021 itu sudah kita lalui bahkan kita mencapai suatu penyerapan 95,9% ini tertinggi dalam sejarah Kementerian Perhubungan.

2021 juga kita mendapatkan satu WTP dari BPK yang kesembilan kali, lalu kami bicara mengenai 2022, kita juga ingin penyerapan ini harus tinggi dan untuk mendapatkan penyerapan tinggi kami cari proyek-proyek yang memang bermanfaat untuk masyarakat ya dan satu per satu para Dirjen dan Kepala Badan menyisir proyek-proyek itu satu sisi terserap dengan baik dan yang kedua memberikan ruang bagi kita juga pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Boyman tentang atau Pak Boyman yang ada di apa Pontianak ya tentang Ketapang mungkin bisa di *consider* ya, tetapi kalau bicara tentang Kayong Utara ya tanahnya mesti selesai dulu gituloh ya. Jadi kita juga ikuti secara *governance* apa yang diminta tadi gitu ya. Selampari katakanlah kalau itu berkaitan cuman *apron* 40 Miliar ini masih mungkin kita laksanakan gitu ya, tetapi memang ruang fiskal Kementerian Perhubungan ini kan agak kecil ya dan kita ada subsidi laut, subsidi udara, subsidi kereta api, darat gitu jadi intinya.

Namun demikian, kita akan bahas di level Dirjen nanti, proyek-proyek mana yang memang seperti yang disampaikan tadi ada kebutuhan dermaga di sungai gitu ya, di Pekanbaru ataupun kalau di laut banyak sekali tempat-tempat tertentu yang memang dibutuhkan. Ada *overlay* bandara yang tidak seberapa mungkin itu kita prioritaskan.

Seperti diketahui juga, di daerah timur itu kan udara atau angin begitu besar ya dan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan dan dermaga itu yang apa namanya rusak ya. Jadi, itu menjadi prioritas kita ya, katakanlah kalau saya di Sultra kemarin saya lihat ada pelabuhan yang satu sisi dia memberikan PNBK yang banyak, tetapi pelabuhannya rusak dan tidak bisa digunakan secara maksimal karena harus ada satu dermaga yang berfungsi sebagai *break water*. Jadi maka saya minta kepada Dirjen untuk membahas itu lebih jauh ya.

Nah, dalam 2022 ini Pak Ketua dan para Wakil Ketua dan para Anggota, kita sudah melampaui satu angka yang relatif lebih baik penyerapannya. Jadi, pada akhir tahun nanti juga kita harapkan penyerapan itu relatif di atas 95%. Jadi, ini memang di atas rata-rata dari Kementerian-Kementerian yang ada.

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat banyak, kami laporkan juga di tahun-tahun ini memang kita butuh sekali semacam upaya-upaya *campaign* mengenai keselamatan. Tadi, disampaikan Bu Restu berkaitan dengan ODOL, apabila kita melakukan kegiatan keselamatan ini secara intensif di semua perkotaan, mungkin kejadian ini tidak terjadi.

Namun kami juga minta tolong kepada Bapak-Ibu sekalian untuk juga memberikan suatu catatan-catatan apabila pulang ke daerah bahwa disiplin mengenai *safe* ini harus dilakukan dengan baik.

Nah, kalau berkaitan dengan 2022 ini kita memang sudah punya target-target yang tertentu ya sesuai dengan rancangan. Namun demikian, kita bisa melakukan suatu catatan-catatan dan kami minta tolong kepada Bapak-Ibu sekalian untuk menemani kami untuk di daerah supaya ada ketepatan penggunaan bagi di daerah-daerah di mana kami mengunjungi. Mungkin itu dari saya, Pak Sekjen ada tambahan?

SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. NOVIE RIYANTO RAHARDJO, MSEA.):

Cukup, Bapak Menteri.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Kalau memang sudah cukup ya langsung ke kesimpulan ya?

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD):

Ya, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD):

Mau menyerahkan ini, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, yang mau menyerahkan silakan.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD):

Sebelum diserahkan ada sedikit yang mau saya sampaikan, Pak Menteri.

Terkait dengan bandara apa namanya Iskandar Muda Banda Aceh, yang mana kita ketahui ketika pandemi kemarin hampir semua bandara kita tutup untuk rute internasionalnya, Pak. Tapi hari ini sudah banyak bandara dibuka termasuk Kualanamu dan sampai hari ini bandara Sultan Iskandar Muda belum dibuka untuk penerbangan internasionalnya, Pak.

Kami kemarin tau kalau Pak Gubernur kami juga sudah ketemu Pak Menteri, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti Pak, sehingga Aceh juga bisa menjadi pintu gerbang masuk keluar negeri, Pak.

Sekian terima kasih, Pak.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Pak. Silakan, Pak Syarif.

F – P. NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri saya ada ingin menyampaikan berkaitan dengan regulasi terhadap izin layar, Pak. Kemarin itu tempat saya sempat-sempat bermasalah karena izin berlayar itulah dikeluarkan, di, sekarang, dulunya di daerah sekarang ditarik ke pusat dan itu pada hari itu juga saya akan bepergian. Saya sempat ditahan, Bapak *nggak* usah jalan juga. Saya bilang mau dibantu *nggak*? Kalau mau bantu ya syukurlah staf Bapak di daerah saya langsung telepon itu datang ke lapangan.

Nah, itu sebaiknya, kalau memang seperti itu antara. Ini kan gini Pak, dermaga-dermaga kita itu kan jauh, kalau macam kami di Kalbar itu kan perhubungan itu adanya di sungainya Ambawang. Ketika mereka untuk macam Rasau Jaya, kemudian daerah lain, untuk izin berlayar itu kan dengan lagi cukup jauh makan waktu dua jam, itu sempat dua hari Pak, ribut.

Saya pikir ini perlu ada kebijakan kaitan dengan ini, supaya tidak terjadi *miss* di lapangan. Itu sempat ribut kemarin, sempat mau demo dan kebetulan saya hari itu mau bepergian makanya, menggunakan itu. Saya kira ini saya mohon kebijakan untuk itu supaya tidak terjadi persoalan di lapangan, karena kita menyadari juga tenaga yang ada di Kementerian.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik masih ada? Pak Hamka, silakan.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yang mau serahkan sekalian serahkan aja Pak, ayo biar cepet, kita kejar maghrib. Silakan biar sekalian, nanti narasinya boleh nyusul. Silakan. Silakan.

Baik, Pak Hamka silakan.

F – P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Makasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Dirjen, dan seluruh jajarannya,**

Yang ingin saya pertanyakan langsung ke Pak Menteri adalah heboh mengenai rencana kenaikan tarif odol, Pak Menteri. Ojol, ojol, odol apakah, ojol ya. Ini mohon penjelasannya apakah itu *terealisasi* atau bagaimana, terkait juga dengan harga tiket pesawat. Nah, ini saya berharap ada kepastian ini, supaya kita juga kalau ditanya masyarakat bisa menjawab dengan baik. Saya kira itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Hamka.

Pak Hamka, sebenarnya soal ojol ini memang itulah juga jadi PR kita, Pak. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kita mau *ngikat* dari undang-undang terkait mekanisme aturan main ojol ini kan sampai hari ini belum bisa lolos ini, ya. Saya belum tau ini dari, tapi nanti kita bahas lagi di internal, Pak.

Kita dorong kemarin, sebagai informasi kepada teman-teman semua. Kita kan diminta dua Pak, dorong undang-undang, tapi kemarin kita dorong satu saja. Saya khawatir kalau kita dorong dua di-*delete* lagi itu lalu lintas dan angkutan jalan. Sekarang semua orang *ngadu* ke sini, negara seolah-olah tidak hadir, aturannya kita mau revisi, *ndak* revisi-revisi sampai sekarang. Orang nyalahkan Komisi V loh, Pak.

Saya sudah ditanya banyak oleh pers, saya rasa semua media pernah bicara soal ini sama teman-teman ya, seolah-olah Komisi V yang menghambat. Setahu saya kita mengusulkan ini sudah berkali-kali Pak, ke Baleg, ya ini tanggung jawab kita semua tapi nanti kita pertajam di rapat internal saja.

Pak Menteri kan sekarang serba salah ini, ya mau tidak mau Pak kalau tidak diurus pakai apa ngurusnya, pakai Permen kan Undang-Undangnya belum ada. Saya rasa begitu terkait dengan ini kita *ndak* usah perpanjang lagi nanti kita bahas khusus ya, terkait dengan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebetulnya kita sudah sangat siap untuk-untuk yang satu ini ya.

Kemarin mohon izin teman-teman kita dorong cuma satu saja, kalau tidak lolos juga saya *nggak* ngerti juga ya. Ini biar kita sama-sama punya tanggung jawab terkait hal ini. Karena di komisi ini mohon maaf secara Fraksi kita masih belum satu suara, ya, jangan sampai nanti yang tidak suara sama-sama kita seolah-olah mewakili Komisi V kan begitu, ya, kita *ndak* mau juga. Saya atas izin Fraksi sudah setuju revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ya, yang lain silakan masih ada.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Irwan, habis Pak Irwan, Pak Bakri. Silakan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN S.IP., M.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V, serta Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan, Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekjen, dan Bapak Dirjen, beserta Pak Direktur, beserta Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang hadir pada rapat hari ini,

Pertama mungkin yang ingin saya tanyakan tadi terkait apa nama arahan Pak Presiden terkait tiket yang dirasakan masyarakat mahal. Saya mau tau, sejauh ini pasca ada arahan Pak Presiden itu terobosan dari Kementerian Perhubungan bagaimana opsinya, kemudian keterlibatan maskapai untuk membantu pemerintah sampai mana juga, gitu. Karena mereka juga terlihat kinerjanya, karyawannya juga belum normal kembali ya terkait pemutusan hubungan kerja dulu, kemudian pesawatnya juga masih kurang. *Nah*, ini ya kita minta pasca arahan Pak Presiden itu apa yang kemudian dilakukan sehingga bisa kemudian menormalisasi harga tiket pesawat yang mahal ini.

Kedua, terkait masih adanya TUKS dan tersus. Kebetulan Kaltim itu memang pusatnya pengelolaan sumber daya alam yang ekstraktif ya, terutama tambang batu bara. Ada beberapa TUKS tersus yang masih menyalahgunakan fungsi pelayanan kegiatan di luar apa namanya di luar ketentuan, di luar apa namanya perizinannya. *Nah*, di mana di lapangan itu belum ada standar pelayanan operasional pelabuhan untuk kapal dan barangnya ini, ini juga kemudian membuat optimalisasi PNBPN juga menjadi tidak optimal karena ada beberapa apa namanya, aktivitas pelabuhan di luar ketentuan yang mana kemudian menjadi beberapa, ada pelabuhan yang ilegal ya, artinya tidak

sesuai dengan peruntukannya dan juga ada beberapa dokumen, dokumen-dokumen ilegal yang digunakan untuk mengangkut produk dari yang berkeliraran di pelabuhan itu. Jadi, kami minta agar apa namanya penertiban TUKS tersus ini, di Kaltim ini bisa optimal.

Ketiga terkait ojol, di mana kemudian upaya revisi Undang-Undang 22 terkait LLAJ ini kemudian tarik ulur-tarik ulur, kami juga mendorong kalau memang kita coba dorong Perpu. Karena memang kami melihat ojol ini sangat dibutuhkan juga oleh negara. Buktinya, regulasi tarifnya juga masih diatur padahal artinya kalau kita bicara tarif justru transportasi publik yang jelas dijamin Undang-Undang malah *nggak* ada perubahan tarif, gitu.

Jadi maksud saya, kalau memang kita anggap penting ojol ini ya kita dorong Perpu Undang-Undang ini, sehingga ojol kemudian ada payung hukumnya sebagai transportasi umum yang bisa kemudian mengangkut penumpang dan barang.

Yang terakhir Pak Menteri, kami menanyakan terkait Penlok Bandara Ujoh Bilang di Mahakam Ulu tadi pagi Pak Bupati, kemudian Ketua DPRD menemui saya sudah cukup lama terkait Penlok. Penlok Ujoh Bilang, di Kabupaten Mahakam Ulu. Mahakam Ulu ini adalah wajah negeri Indonesia perbatasan kita dengan Malaysia ya, masih terisolir menu dari Ibukota provinsi Samarinda ke Mahulu itu 15 jam, ya. Jalan nasionalnya juga belum tuntas, sehingga saya pikir keberadaan bandara bisa mengakomodasi ya beberapa kabupaten termasuk juga dari Kabupaten Malinau yang ada di Kaltara, sehingga harapannya bisa didorong Penloknya segera terkait bandara Ujoh Bilang ini.

Terima kasih juga untuk DAK-nya, tadi di Mahakam Ulu, di Mahakam Ulu saya lihat untuk pelabuhan sungai ini penting untuk mendorong pariwisata di Mahakam Ulu. Ini adalah kearifan lokal, karena Mahakam Ulu itu hampir 90% adalah memang masyarakat lokal, masyarakat adat dayak yang ada di Kalimantan Timur. Itu Pimpinan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak Irwan.

Sekarang sudah magrib, saya tanya ke *floor* dulu apakah kita maghrib *break* dulu atau saya kembalikan ke *floor* dulu? Bagaimana?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setelah selesai, Pak Bakri lah.

KETUA RAPAT:

Ndak, ini sepakati dulu kita lanjut, apa kita sholat dulu?

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Saya mau bicara ini hanya karena kangen sama Pak Lasarus saja, terakhir ketemu di Pontianak baru kali ini ketemu ya, karena sudah ketemu Pak Lasarus berarti sudah tercapai apa keinginan saya, sudah saya anggap selesai maka jawaban saya singkat saja, saya kira tidak perlu diperpanjang rapat ini ya kan, cukup sampai di sini, lain waktu masih bisa bertemu kembali.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Tergantung Pak Bakri, singkat ya silakan, ini sudah maghrib ini.

F – PAN (H. A. BAKRI HM., S.E.):

Pak Dewo ini kalau bicara *nggak* pernah bisa dianu disanggah, *nggak* tahunya ilmunya apa ini Pak Dewo.

Baik. Terima kasih, Pak Ketua, Pak Menteri.

Saya ada dua, ada tiga hal ini. Pertama Pak Menteri, terkait di Jambi itu ada Pelabuhan Roro, Pak. Roro itu saya sering lihat itu Pelabuhan Roro itu sudah saatnya harus ditambah. Jadi, ada yang datang ada yang pergi, sudah itu pelabuhan dermaganya sendiri mungkin harus diperbesar. *Nah*, ini pernah saya sampaikan ke Pak Menteri sendiri, mudah-mudahan bisa diantisipasi.

Karena kalau tidak, kapasitas apa itu kapal itu kalau kita lihat videonya mengerikan Pak, betul, malam-malam itu bukan main seperti udah tumpukan kayak ikan asin aja. *Nah*, ini menyampaikan aspirasi daripada masyarakat yang ada di Jambi, khususnya di Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal. Pak Menteri mungkin sudah pernah melihat kalau Pak Dirjen lama yang meresmikan itu.

Terus yang kedua adalah masalah pelabuhan udara. Di Jambi itu ada destinasi wisata Kerinci, ramai terus Pak, di situ. *Nah*, mereka juga meminta kapan ini tiket sudah mahal, tapi kok pesawat tidak ada, nah itu, dibalik pula

kan. Jadi, mudah-mudahan bisa dipercepat ataupun ada *airline* mungkin yang bisa beroperasi di sana, karena ini wisata yang sangat strategis, Pak.

Terkait tiket ini juga menjadi permasalahan. Saya mungkin berdosa kalau hari ini tidak menyampaikan, tadi siang saya mendarat di Jakarta. Pada saat di Jambi itu memang semua masyarakat menyatakan kok tiket mahal, sampai tiket harganya itu yang biasanya 700-800, ini dalam dua minggu ini sampai satu juta setengah, malahan ada satu juta tujuh ratus, saya tidak tau, tidak tau ini, padahal Presiden sudah sering kali berteriak. Saya *pingin* mungkin melalui forum ini Pak Menteri mungkin bisa cepat ya, karena bagaimanapun juga akan mempengaruhi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Masih ada?

F – P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Pimpinan, sedikit aja.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Fauzi.

F – P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Ya, makasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sedikit saja, Pak Ketua. Pak Menteri, sama-sama kita ketahui, tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri bahwasannya kereta api Makassar – Parepare juga menjadi skala prioritas, tapi kita sama-sama mengetahui bahwasanya ada sedikit entah *miss* komunikasi atau permasalahan antara beberapa pihak di sana saya mengharapkan ini tetap bisa terserap di tahun ini, Pak Menteri.

Nah, mengenai permasalahannya kalau Pak Menteri, saya pernah bicara di media agar Pak Menteri kalau memang perlu untuk mencairkan suasana ya saya pikir tidak ada salahnya, Pak Menteri. Saya pikir itu saja.

Makasih, Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Masih ada? Cukup. Baik, Pak Menteri mungkin, silakan Pak Menteri singkat, yang teknis nanti di Direktorat Jenderal aja, Pak. Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

**Pak Ketua,
Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi V yang saya hormati,**

Menurut hemat saya, apa yang disampaikan Bapak-Bapak tadi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya *dedicated* ya, di daerah apakah di Lampung, tadi, di Sumsel, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kalimantan, di Sulawesi, juga mengenai bandara itu pada dasarnya sudah kita bahas di tingkat Menko tentang standar internasional, tinggal kita finalkan setelah nanti Pak Menko mengeluarkan suratnya kita akan tindak lanjut.

Berkaitan dengan apa yang disampaikan, saya sangat berterima kasih Bapak-Bapak, karena kadang-kadang mata telinga kami ya terbatas, tentu Bapak-Bapak yang memiliki Dapil punya kapasitas ya, seperti Makassar, tapi saya udah dengar dua-duanya sudah ada telepon Pak, jadi *Insy* Allah membaiklah dan juga Pak Bakri ya sudah kita pikirkan untuk Kerinci dan sebagainya.

Secara umum, saya terima kasih atas rapat yang konstruktif hari ini. Kami akan masukkan dalam evaluasi yang akan kita lakukan di akhir 2022 ini, berkaitan dengan, terutama berkaitan dengan *campaign* pada masyarakat ya. Karena memang saat ini banyak sekali upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk menjelaskan pada masyarakat. Oleh karenanya, nanti sekiranya bertepatan tempat dan waktu kita bisa kolaborasi bersama dan sekali lagi terima kasih atas masukannya, kami akan maksimalkan apa yang menjadi amanah kita bersama.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Menteri.

Sekadar memperkuat aja, yang Ketapang itu memang Pak, ini Pak Novie ya, tau betul ya, itu Ketapang itu kan memang *urgent* untuk optimalisasi Pak, kalau kita nunggu yang baru tuh lama Pak, itu bandara yang. *Runway* ujung-ujung dua-duanya sama ada masalah, Pak, itu kalau cuaca buruk

berbahaya sekali itu. Jadi, optimalisasi misi yang ada ini sembari nunggu urusan tanah itu selesai, Pak. Eksistingnya aja yang kita perbaiki. Sekedar memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Boy sama Pak Syarif tadi.

Baik, teman-teman sekalian, kita langsung ke kesimpulan ya. Baik, Pak Roberth mau bicara? Silakan. Baik kita ke kesimpulan rapat. Silakan.

F – P. NASDEM (ROBERTH ROUW):

Pimpinan, sebelum ke sana, Pak Menteri, ada beberapa hal tadi saya ingin sampaikan Pak Menteri, waktu itu saya sudah sampaikan Pak Menteri bahwa ada diskriminasi terhadap kami yang menuju ke Papua dan dari Papua yang menuju ke Jakarta, yaitu kalau kami turun di Ujung Pandang maka itu kami harus tentang barang-barang semua, Pak Menteri.

Ini saya sudah dikomplain sama masyarakat Papua, apakah kami ini kok diperlakukan seperti ini gitu. Kan kita sudah lewat *x-ray* di Papua, kita sudah lewat *x-ray* di Jakarta tapi kita turun, kita tidak ganti pesawat, kita dengan pesawat yang sama, tapi kita wajib suruh turun, tapi kalau pesawat itu terlambat kita suruh duduk di pesawat, penumpang naik kita berangkat. Ini kan tidak kebijakan yang, ya kalau memang harus turun ya setiap kali itu harus turun, tapi ini kan tergantung cuaca, kalau dia terlambat boleh, penumpang tidak boleh turun, barang tinggal semua.

Nah, ini, ini yang perlu ya Pak Menteri saya minta ada satu kepastian dan saya minta kalau bisa itu dihapus karena ini menjadi, orang Papua merasa diskriminasi terhadap orang papua.

Dan berikut Pak Menteri, ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya ini nanti saya akan minta khusus bicara dengan Dirjen Perhubungan, Dirjen Udara karena, ya kita tau di Papua ini kan ada diskresi khusus untuk kelayakan pesawat di sana ya kan. Kalau kita mau tegakkan itu, ya pasti semua kena ya kan, kita bilang angkutan udara di sana kita berikan diskresi khusus untuk pesawat yang cuma satu mesin boleh menjadi komersial, itu kan tidak boleh sebenarnya harus dua mesin baru bisa menjadi komersil, tapi kan kita boleh berikan itu ya kan.

Nah, pesawat yang umur sekian tidak boleh terbang tapi di Papua boleh ya kan. Ini, diskresi khusus, saya sangat berterima kasih Pak Menteri ya kan, tetapi ada saya dapat info bahwa dari keempat Dirjen Perhubungan, ini nanti saya ngomong sama Pak Dirjen untuk ada oknum yang, ya mencoba untuk memberikan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu itu dilakukan ya, supaya ya diberikanlah itu untuk demi kelancaran transportasi untuk membantu masyarakat di sana. Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bu Cen terakhir, silakan.

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, dan Pak Menteri serta jajaran,

Saya harus sampaikan ini Pak Menteri kalau *nggak, tak* bisa pulang saya nanti. Pak Menteri, tanggal 29 ada kenaikan harga ojol ya. Jadi itu penundaan setelah 25 hari, apakah sosialisasi itu sudah cukup karena saya baru menerima WA sudah ada pernyataan sikap yang saya sampaikan kepada Ketua saya, itu langsung kepada Ketua Komisi bagaimana kalau kita menunggu Perpu atau yang lain-lain apakah ini tetap dinaikkan, karena kita harus memikirkan kesanggupan masyarakat.

Karena Pak Menteri, kita tau semua saat ini semua naik, termasuk harga tiket pesawat dan yang lain-lain. Jadi, tolong dipikirkan kembali apakah tanggal 29 ini harus dinaikkan.

Nah, yang satu lagi Pak Menteri. Pak Presiden kemarin kan sudah menginstruksikan ke Pak Menteri untuk menyelesaikan tiket pesawat yang terlalu tinggi dan Pak Erick Thohir juga, Pak Erick langsung menginstruksikan kepada Garuda. Kita tau kalau BUMN itu kan cuma Garuda, tapi yang lain-lain kan masih tinggi apa tindakan Pak Menteri, itu yang perlu kita ketahui untuk penjelasannya. Terima kasih. Itu saja Pimpinan, *nggak* lama-lama.

Terima kasih semua.

KETUA RAPAT:

Karena ini pertanyaannya sangat substantif Pak Menteri, mungkin perlu dijawab ini, yang Pak Roberth dengan Ibu Cen. Mungkin silakan, Pak Menteri.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, Pimpinan. Kalau memang usulan saya tidak diakomodir masih perlu dibicarakan, beri kesempatan kawan-kawan izin saya juga menyampaikan sesuatu Pimpinan, boleh ya?

KETUA RAPAT:

Panjang singkat?

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Kalau saya *nggak* bisa dijamin pendek, Ketua.

KETUA RAPAT:

Sudahlah, nanti kita sama Direktorat Jenderal aja, yang tadi udah cukup Mas Dewo.

F – P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):

Sama Dirjen aja ya? Ok

KETUA RAPAT:

Iya sama Dirjen aja.

Silakan, Pak Menteri silakan mungkin soal tiket dan masalah Pak Roberth Rouw tadi, silakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Pak Roberth, pertama kali saya minta maaf, ya, kalau ada kejadian demikian tapi memang di udara itu rezimnya, rezim *safety*, jadi mereka kadang-kadang takut untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan yang berisiko *safety* tapi apa yang disampaikan Pak Roberth benar ya, jadi nanti kita akan koreksi itu ya.

Jadi maaf, tapi memang kalau di udara itu memang kita agak hati-hati sekali. Bahwa di Papua belum maksimal memang iya, tapi apa yang di kita lakukan di Papua itu sudah *improve*, Pak. Jadi, navigasinya relatif lebih baik dan juga kan sekarang jaranglah di seperti 3-4 tahun yang lalu itu jarang, jadi kita akan *improve* Pak, itu ya.

Berkaitan dengan tiket, saya ingin sampaikan bahwa ada yang sudah, ada yang sedang berlangsung, ada yang akan. Jadi, prinsipnya Kementerian Perhubungan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Presiden pada kami. Memang melihat bahwa ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Tiga hal yang harus kita lakukan itu yang pertama kali adalah kita mengajak semua *airlines* untuk mengevaluasi diri dengan melakukan efisiensi dan melakukan inovasi agar mereka bisa melakukan suatu upaya-upaya sehingga tarif yang diberikan kepada masyarakat itu lebih rendah ya.

Bahwa fakta memang di tempat-tempat yang *remote* ya, yang menggunakan pesawat baling-baling, memang terjadi suatu kesenjangan berkaitan dengan mahalnya avtur lebih tinggi, lebih jauh dan okupensinya relatif rendah ya. Jadi, memang itu harus dipahami, tapi kami tetap mengharapkan para *airlines* melakukan suatu upaya-upaya itu.

Yang kedua adalah satu kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, *airlines* dan masyarakat. Jadi, ada dua yang menjadi satu masalah itu adalah kekosongan atau *occupancy* yang tidak maksimal pada *weekdays* ya. Kalau hari Selasa sama hari Kamis orang itu tidak berpergian,

juga tengah hari tidak bepergian, padahal kalau itu dipromosikan dengan diskon dan sebagainya, banyak orang yang pergi ke sana.

Untuk kepentingan keluarga kan *nggak* mesti Sabtu, Minggu ya. Jadi atau untuk kepentingan kantor kan bisa dilakukan tengah hari, tidak perlu pagi atau sore hari, juga di tempat-tempat yang di daerah, ya katakanlah tempatnya Pak, Pak Syahrul atau di tempatnya Pak Roberth, di daerah itu propeler itu kadang-kadang cuma 40%, Pak.

Nah, dalam kesempatan ini saya memberikan contoh kebetulan tempatnya itu di Sulsel ya, bukan karena Pak Hamka di sini. Sumsel itu Toraja bagus sekali, tapi sudah diikutin di Kalimantan Barat juga itu, nanti Papua menyusul. Jadi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah itu mensubsidi, mensubsidi *guarantee* daripada *occupancy* 60-70%. Kalau itu tidak tercapai, mereka membayar atau sebaliknya, dia turut memasarkan tiket-tiket itu kepada masyarakat, paling tidak pada pegawainya, kepada Saudaranya atau masyarakat tertentu. Jadi kayak ada satu *guarantee* gitu.

Karena kalau *occupancy* propeler itu hanya 50% mereka itu rugi, lebih baik mereka *nggak* terbang gitu. *Nah*, ini yang mungkin Bapak-Bapak yang ada di daerah harus memahami.

Silampari relatif konsisten, Pak Eddy Santana. Waktu itu juga mereka berjanji untuk melakukan *guarantee occupancy* dan ternyata di Silampari sudah tiap hari ya, sekarang ya, setiap hari dan relatif penuh, empat kali seminggu ya tapi relatif penuh. Jadi *nggak* perlu membayar dendanya gitu. Jadi, sudah dibuktikan beberapa tempat ya.

Saya sudah *exercise* beberapa tempat, jadi biasanya memang tempat-tempat yang *occupancy*-nya tidak maksimal itu adalah daerah-daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua banyak seperti itu. Jadi, kita minta butuh Pemda-Pemda ikut serta.

Yang ketiga adalah kami sudah sampaikan surat ke Menko Perekonomian ditujukan kepada, ditembuskan kepada beberapa Kementerian, termasuk Kementerian Keuangan untuk meninjau apabila dimungkinkan PPN itu diturunkan dari 11% menjadi 5%, *temporary* aja, sekarang ini mungkin berapa, tiga bulan, setelah itu balik lagi, tapi ini tergantung dari nanti *policy* dari Kementerian Keuangan.

Jadi, secara konkrit sudah kita lakukan itu, besok siang saya akan kumpulkan lagi, kemarin sudah saya kumpulkan. Besok siang saya bersama BNI akan kumpulkan *stakeholder airline* untuk membahas bagaimana penurunan ini bisa terjadi, itu kira-kira yang sudah kami lakukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, nanti di-*update* ke kita Pak Menteri, soal hasil pembicaraan dengan *stakeholder* terkait dengan upaya penurunan tiket ini, supaya kami juga bisa menjelaskan kepada masyarakat manakala ada pertanyaan-pertanyaan ke Komisi V.

F – P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, terkait dengan ojol tadi kelihatannya mungkin belum terjawab ya. Ya silakan, sudah langsung diinterupsi saya, Pak.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Ojol masih empat hari Bu, jadi kita masih diskusi. Kita harus dengar operator, masyarakat kita lagi riset. Jadi, tanggal 29 pagi-pagi saya kirim surat sama Ibu ya, hasilnya seperti apa. Pasti kita dengerin omongan Ibu itu kita dengerin.

KETUA RAPAT:

Baik, soal ojol sedang dilakukan pembicaraan dengan berbagai pihak ya, nanti tanggal 29, Pemerintah akan mengambil keputusan, ya. Baik, demikian, Bu Cen cukup ya? Cukup, baik. Karena ini dalam proses jadi kita *ndak* bisa paksa juga Bu, ya ibarat orang apa namanya kalau melahirkan *ndak* bisa dipaksa Bu, tunggu waktunya gitu ya, baik.

Draf kesimpulan rapat kita langsung saja ya, supaya teman-teman *ndak* kehilangan waktu maghrib.

Ya,

Draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, 24 Agustus 2022.

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ya LKPP Tahun 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mempertahankan capaian kinerja dan opini tersebut di tahun mendatang.

Ini normatif ya. Setuju ya ini ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian,

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun 2022 sesuai saran dan masukkan Komisi V DPR RI, di mana capaian per bulan Agustus 2022 sebagai berikut ya, Realisasi keuangan 52,6% dan realisasi fisik 57,8%.
3. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan terhadap alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam RAPBN Tahun 2023 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor: S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07 Tahun 2022, tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut, Pagu Kebutuhan, Kementerian Perhubungan Pagu Kebutuhan Rp73.845.092.377.000, Nota Keuangan RAPBN Tahun 2023 ya, Rp33.441.189.844.000, jadi ada selisih atau atau *backlog* Rp40.403.902.533.000.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai Pagu Kebutuhan melalui mekanisme pembahasan tentang APBN di DPR RI.

Anggota, Pimpinan cukup?

(RAPAT: SETUJU)

Pak Menteri? Cukup?

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Tepuk tanganlah untuk WTP-nya.

Mas Dewo kok *nggak* tepuk tangan. *Nah*, begitu *dong* Mas. Jangan panjang terus *nggak* tepuk tangan gitu.

Baik, terima kasih Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum kita tutup Pak Menteri, kita mau menyerahkan dulu Pak, ini hasil rangkuman, hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Masa Sidang ke-V. Saya minta Pimpinan ke depan kita serahkan secara resmi kepada Pak Menteri, ini sebagai bahan untuk melengkapi Pak Menteri dalam menyusun RAPBN Tahun 2023.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian.

Dengan telah disepakatinya kesimpulan rapat dan diteruskannya rangkuman hasil kunjungan kerja komisi, baik kunjungan dalam rangka reses maupun spesifik, reses komisi maksudnya ya, maka selesailah rapat kita pada

hari ini. Sebelum saya tutup, saya persilakan Pak Menteri, menyampaikan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai kata-kata penutup, saya persilakan.

MENTERI PERHUBUNGAN RI (Ir. BUDI KARYA SUMADI):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pak Ketua,
Pak wakil, Bapak-Bapak Wakil Ketua, dan
Bapak-Ibu Anggota Komisi V,**

Terima kasih atas masukan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga atas diskusi dan kami akan meng-*improve* apa yang harus kita lakukan, yakni bahwa kami melakukan satu ini dengan seksama, dengan teliti. Pak Presiden meminta kami untuk memastikan apa yang kami laksanakan itu *deliver*.

Artinya, apa yang kami laksanakan itu berguna bagi masyarakat dan apabila berguna masyarakat tentunya Bapak-Ibu sekalian juga sepakat dengan apa yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat dan Allah selalu memberikan pertolongan pada kita.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, kasih *applause* buat Pak Menteri.

Terima kasih, Pak Menteri dan seluruh jajaran.

Teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi V, maka selesailah rapat kita pada hari ini. Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota, Pak Menteri, mengucapkan terima kasih atas kehadiran di undangan rapat pada hari ini dan menyampaikan permohonan maaf manakala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap syukur *alhamdulillah* rapat ini saya tutup dan dinyatakan selesai.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, dan
Salam sejahtera bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.20 WIB)

JAKARTA, 24 Agustus 2022
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002